

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2021). Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi sebagai Dampak Reformasi Keuangan dalam Bidang Pendidikan di Indonesia. *Journal of Education and Teaching (JET)*, 2(1), 52–71. <https://doi.org/10.51454/jet.v2i1.106>
- Agustino, L. (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung. CV. Alfabeta, 7.
- Alifa, H. N. (2023). Perguruan Tinggi Negeri BLU di Indonesia: Pengelolaan Anggaran, Karakteristik, dan Peningkatan Kinerja. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 11(2), 401–416. <https://doi.org/10.17509/jrak.v11i2.48827>
- Amanda, I. P. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33–37.
- Darlis, A., Lubis, A., Farha, M., Loali, R. R. P., & Lestari, S. I. (2023). Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH). *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2(3), 585–597.
- Herlina, Firmansyah, R., Harjanto, A. P., & Hartono, R. (2023). Analysis of the Readiness for Changes in the Financial System of Public Service Agency State University (Blu) Become Ptn Legal Entity (Ptnbh) (Study At Universitas Negeri Semarang. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(2), 1472–1485. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i2.49523>
- Ii, B. a B., Tinggi, T. P., Umum, T., & Hukum, B. (2012). *Status Badan Hukum Perguruan Tinggi Negeri Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun*. 19–74.
- Jalaluddin. (2023). *Teologi Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. VI(2), 81.
- Kafrawi, S., Firmansyah, R., Hartono, R., & Budiman, K. (2022). Evaluasi Sistem Informasi Keuangan Universitas Negeri Semarang Dengan Pendekatan Delone Dan Mclean. *CAPITAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 5(2), 86. <https://doi.org/10.25273/capital.v5i2.12016>
- Maunah, B. (2009). *Landasan Pendidikan*. 5.
- Pengelolaan, K., Unnes, A., & Rangka, D. (2023). *Kesiapan Pengelolaan Aset Unnes Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Mendukung PTN Badan Hukum*. 3(2), 111–121. <https://doi.org/10.15294/beaj.v3i2.39422>
- Permatasari, T. A. J. (201 C.E.). Fenomena Penerimaan Dengan Penghindaran Dalam Penerapan Sistem Baru Pengelolaan Keuangan Pada Ptn-Bh. *Universitas Diponogoro, Semarang*.
- Pradhana, R. S. (2021). Autonomy of Financial Management At State College With Legal Entity. *Jurnal Hukum Peratun*, 4(2), 171–190.

<https://doi.org/10.25216/peratun.422021.171-190>

- Pratiwi, D. A., Purwanggono, B., & Bakhtiar, A. (2017). Harmonisasi Indikator Kinerja UNDIP (IKU) Dengan Kriteria World Class University QS World Rankings. *Industrial Engineering Online Journal*, 6(1), 1–11.
- Rokim. (2019). Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Islam*, 14(2), 60–69.
- Rushananto. (2014). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik*, 1993, 15.
- Solihin, M. (2017). Education Sector Liberalisation in Indonesia, 2004-2011. *Jurnal Dimensi*, 6(1), 126–138.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Issue January).
- Sujoko, A. (2020). Konsep dan Praktek Ruang Lingkup Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(3), 442–463.
- Sutini, L. (2019). Akibat Hukum PTN BH yang Tidak Memenuhi Evaluasi Kinerja. *Jurist-Diction*, 2(5), 1765. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15242>
- Tamara, N. (2022). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Pengelolaan Keuangan Di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Ptn-Bh). *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13(1), 17–25. <https://doi.org/10.21009/jmp.v13i1.27037>
- Wahab, S. A. (2016). *Analisis kebijakan*. 11–47.
- Zubair, F., Dewi, R., & Kadarisman, A. (2018). Strategi Komunikasi Publik Dalam Membangun Pemahaman Mahasiswa Terhadap Penerapan PTNBH. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 11(2), 74. <https://doi.org/10.14421/pjk.v11i2.1328>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD). (2020). *Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri*. Diakses dari <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/11/Buku-Panduan-Indikator-Kinerja-Utama-PTN.pdf> pada 6 Januari 2025.
- Universitas Diponegoro (UNDIP). (2019). *Peraturan Rektor Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di bawah Universitas Diponegoro*. Diakses dari <https://ppid.undip.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/Peraturan-Rektor-No-2-tentang-Organisasi-dan-Tata-Kerja-Unsur-di-Bawah-Rektor-2019-1.pdf> pada 6 Januari 2025.
- Universitas Diponegoro (UNDIP). (2020). *Peraturan Pemerintah No. 52 Tentang Statuta UNDIP*. Diakses dari <https://mwa.undip.ac.id/tugas-dan-wewenang-mwa/> pada 6 Januari 2025.

Universitas Diponegoro (UNDIP). (2021). *Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal dan Sumbangan Pengembangan Institusi Program Sarjana/Diploma Universitas Diponegoro*. Diakses dari <https://ppid.undip.ac.id/download/penetapan-ukt-dan-spi/#> pada 9 Januari 2025.

Universitas Diponegoro (UNDIP). (2023). *Laporan Kinerja Universitas Diponegoro*. Diakses dari <https://ppid.undip.ac.id/download/laporan-kinerja-2023/#> pada 15 Januari 2025.

Universitas Diponegoro (UNDIP). (2024). *RKAT Perubahan Ketiga 2023*. Diakses dari <https://ppid.undip.ac.id/wp-content/uploads/2024/10/RKAT-Perubahan-Ketiga-RKAT-2023.pdf> pada 19 Desember 2024.

Universitas Diponegoro (UNDIP). (2024). *Sistem Informasi Universitas Diponegoro*. Diakses dari <https://undip.ac.id/language/en/information-system-undip> pada 10 Januari 2025.

Universitas Diponegoro (UNDIP). (2024). *Layanan PPID Universitas Diponegoro*. Diakses dari <https://ppid.undip.ac.id/> pada 10 Januari 2025.

Universitas Negeri Semarang (UNNES). (2023). *Sejarah Direktorat Perencanaan dan Keuangan*. Diakses dari <https://unnes.ac.id/dpk/id/tentang-bpk/> pada 9 Januari 2025.

Universitas Negeri Semarang (UNNES). (2023). *Layanan PPID Universitas Negeri Semarang*. Diakses dari <https://unnes.ac.id/ppid/> pada 10 Januari 2025.

Universitas Negeri Semarang (UNNES). (2023). *Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Semarang*. Diakses dari <https://unnes.ac.id/tentang-unnes/satuan-pengawas-internal/> pada 10 Januari 2025.

Universitas Negeri Semarang (UNNES). (2024). *RKAT 2023*. Diakses dari <https://drive.google.com/file/d/1IXwjfWEV86BuFaf-NS1EwIBsPkApt6Z0/view> pada 20 Desember 2024.

Universitas Negeri Semarang (UNNES). (2024). *Laporan Kinerja Universitas Negeri Semarang*. Diakses dari https://drive.google.com/file/d/1_yaUIfO5GQz9notvm0ghzTCGezzUXBq9/view?usp=drive_link pada 15 Januari 2025.

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban, Pemberian bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Peraturan Pemerintah Negara Kestuan Republik Indonesia TAP. MPR. NO. IV Tahun 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTNBH.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2007 tentang kriteria dan Persyaratan Penyusun Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang

Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 tentang Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 63 ayat 3 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 65 Ayat 1 tentang Pendidikan Tinggi sebagai bentuk pengelolaan perguruan tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 ayat 1 tentang Pendanaan Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat 3 tentang Pengalokasian Dana Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan

Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.